JURNAL ALTIFANI
Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Vol. 6, No. 6 -November 2026, Hal. 3892-3905
DOI: 10.59395/altifani.v6i6.1454

Collaborative Governance dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Ekonomi Sirkular untuk Mendukung Ketahanan Pangan di Desa Sumbersari Kabupaten Lamongan

Collaborative Governance in a Circular Economy-Based Community Empowerment Program to Support Food Security in Sumbersari Village, Lamongan Regency

Muhammad Ferdianto[1], Meirinawati[2], Eva Hany Fanida[3], Adam Jamal[4], Lutfi Saksono[5], Muamar Zainul Arif[6]
[1,2,3,4]Program Studi S1 Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya
[5]Program Studi S1 Sastra Jerman, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Surabaya
[6]Program Studi S1 Pendidikan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Surabaya
*muhammadferdianto.23102@mhs.unesa.ac.id[1], meirinawati@unesa.ac.id[2], evafanida@unesa.ac.id[3], adamjamal@unesa.ac.id[4], lutfisaksono@unesa.ac.id[5], muamararif@unesa.ac.id[6]

Received:	Revised:	Accepted:	Available online:
04.10.2026	23.10.2026	31.10.2026	13.11.2026

Abstract: *Village food security requires sustainable management of local resources supported by collaboration among actors. This study analyzes collaborative governance in a Circular Economy-Based Community Empowerment Program in Sumbersari Village, Lamongan Regency. This study employed a descriptive qualitative approach with a case study design involving 16 informants from the Universitas Negeri Surabaya implementation team, Sumbersari Village Government, Sumber Rejeki Livestock Farmer Group, and Sumbersari Village Youth Organization. Data were collected through semi-structured interviews, observation, and documentation, then analyzed based on four dimensions of collaborative governance: consensus orientation, leadership, communication, and resource sharing. The findings show that consensus orientation has been established, leadership follows a tiered pattern, and multi-way communication occurs through face-to-face and online interactions. Resource sharing emerged as the strongest dimension through the integration of knowledge, technology, institutional support, production capacity, and marketing capabilities among actors. The collaboration strengthens community empowerment through local production systems that may indirectly contribute to food security.*
Keywords*: collaborative governance; community empowerment; circular economy; food security; Sumbersari Village*

Abstrak: Ketahanan pangan desa memerlukan pengelolaan sumber daya lokal yang didukung kerja sama antaraktor agar pemanfaatannya berkelanjutan. Penelitian ini menganalisis *collaborative governance* dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Ekonomi Sirkular di Desa Sumbersari, Kabupaten Lamongan. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan desain studi kasus yang melibatkan 16 informan dari tim pelaksana Universitas Negeri Surabaya, Pemerintah Desa Sumbersari, Kelompok Tani Ternak Sumber Rejeki, dan Karang Taruna. Data dikumpulkan melalui wawancara semiterstruktur, observasi, dan dokumentasi, lalu dianalisis berdasarkan empat dimensi *collaborative governance* mencakup orientasi konsensus, kepemimpinan, komunikasi, dan berbagi sumber daya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa orientasi konsensus telah terbentuk, kepemimpinan berjalan secara bertingkat, dan komunikasi multiarah berlangsung langsung maupun daring. Berbagi sumber daya menjadi dimensi paling kuat melalui pemanfaatan kapasitas antaraktor berupa pengetahuan, teknologi, dukungan kelembagaan, kapasitas produksi, dan kemampuan pemasaran. Kolaborasi tersebut memperkuat pemberdayaan masyarakat melalui penguatan sistem produksi lokal yang berpotensi mendukung ketahanan pangan secara tidak langsung.
Kata kunci: *collaborative governance*; pemberdayaan masyarakat; ekonomi sirkular; ketahanan pangan; Desa Sumbersari

1. PENDAHULUAN

Ketahanan pangan menjadi salah satu agenda penting dalam pembangunan berkelanjutan karena berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan kesejahteraan masyarakat. Keberlanjutan sistem pangan juga bergantung pada kemampuan setiap wilayah menjaga ketersediaan dan akses pangan bagi penduduknya. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mendefinisikan ketahanan pangan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi setiap individu,

Vol. 6, No. 6 -November 2026, Hal. 3892-3905
DOI: 10.59395/altifani.v6i6.1454

baik dari aspek jumlah, mutu, keamanan, keragaman, kandungan gizi, pemerataan, maupun keterjangkauan. Pencapaian kondisi tersebut tidak cukup ditopang oleh peningkatan produksi. Kemampuan masyarakat mengelola sumber daya lokal secara efektif dan berkelanjutan turut menentukan ketahanan sistem pangan.

Ekonomi sirkular menawarkan pendekatan yang relevan untuk mendukung sistem pangan berkelanjutan dengan mengubah cara sumber daya dimanfaatkan. (Kirchherr et al., 2017) menjelaskan bahwa ekonomi sirkular berupaya menggantikan pola ekonomi linear yang menghasilkan limbah. Pengurangan penggunaan bahan dan pemanfaatan kembali menjadi bagian penting, sedangkan daur ulang dan pemulihan material melengkapi proses tersebut. Orientasinya tidak berhenti pada pengelolaan limbah. Perubahan sistem produksi juga diperlukan agar manfaat ekonomi dan sosial tetap tercipta tanpa mengabaikan lingkungan. (Manuel et al., 2021) menempatkan efisiensi sumber daya dan pemanfaatan hasil samping sebagai bagian penting ekonomi sirkular di sektor pertanian. (Miranda et al., 2021) menambahkan bahwa penerapannya juga dipengaruhi oleh tata kelola hubungan antaraktor dan penggunaan teknologi. Prinsip tersebut terlihat pada integrasi pertanian dan peternakan ketika residu pertanian dimanfaatkan sebagai pakan dan limbah ternak diolah menjadi pupuk organik.

Potensi integrasi pertanian dan peternakan terlihat di Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan, yang memiliki basis aktivitas peternakan cukup besar. Publikasi Kecamatan Sambeng dalam Angka 2025 mencatat populasi sapi potong sebanyak 13.828 ekor pada tahun 2023 dan 12.481 ekor pada tahun 2024. Populasi kambing meningkat dari 4.039 ekor menjadi 4.072 ekor. Populasi domba juga bertambah dari 1.808 ekor menjadi 1.868 ekor. Data tersebut menunjukkan adanya sumber daya lokal yang dapat dikembangkan dalam sistem pertanian-peternakan terpadu. Manfaat ekonomi dan lingkungan dari potensi tersebut tetap memerlukan pengelolaan yang jelas serta koordinasi antarpihak.

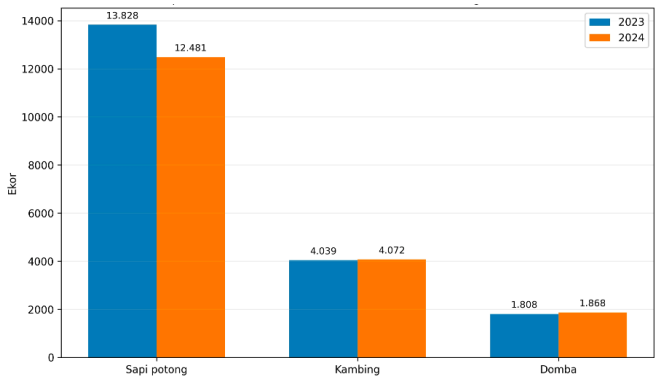

Gambar 1. Populasi Ternak Ruminansia di Kecamatan Sambeng Tahun 2023-2024
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan (2025), diolah penulis

Gambar 1 menunjukkan bahwa sapi potong merupakan komoditas ruminansia dengan populasi terbesar dibandingkan kambing dan domba di Kecamatan Sambeng. Dominasi populasi tersebut menunjukkan ketersediaan sumber daya peternakan yang berpotensi menghasilkan limbah organik untuk mendukung pengembangan sistem pertanian-peternakan terpadu**.** Potensi sumber daya peternakan belum sepenuhnya memberi manfaat ekonomi dan lingkungan secara optimal bagi masyarakat. Pengolahan limbah masih menghadapi keterbatasan sarana, sedangkan keberlanjutan kegiatan memerlukan pengaturan kerja yang mampu menyesuaikan peran setiap pihak. Temuan awal menunjukkan bahwa kebutuhan kelompok tidak hanya berkaitan dengan teknologi pengolahan, tetapi juga dengan pengelolaan produksi, perawatan alat, pemasaran, serta koordinasi setelah pendampingan berkurang. Pembagian fungsi utama antaraktor telah mulai terbentuk, tetapi beberapa pengaturan teknis masih menyesuaikan kondisi lapangan. Persoalan tersebut menunjukkan bahwa keberlanjutan program tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi. Kemampuan para aktor membangun kesepakatan, membagi kewenangan, menjaga komunikasi, dan mengelola sumber

Vol. 6, No. 6 -November 2026, Hal. 3892-3905
DOI: 10.59395/altifani.v6i6.1454

daya bersama turut menentukan pelaksanaan program. Kondisi tersebut menempatkan *collaborative governance* sebagai aspek penting dalam program ekonomi sirkular di Desa Sumbersari.

Keberadaan teknologi dalam program pemberdayaan belum cukup apabila tidak ditopang kapasitas kelembagaan dan hubungan kerja yang jelas. (Agita et al., 2025) menunjukkan bahwa edukasi dan dukungan teknologi dapat memperkuat program ketahanan pangan ketika dibarengi pembentukan kelompok pengelola, meskipun kelembagaan pelaksana masih memerlukan penguatan. (Wijaya et al., 2019) menempatkan kemitraan sebagai sarana untuk memperkuat kapasitas masyarakat sekaligus membuka peluang usaha dan akses pasar. (Rahaju et al., 2018) memberi perhatian pada hubungan profesional serta kesepakatan kerja sebagai penentu kualitas kolaborasi antarorganisasi. (Fanida & Ladiqi, 2024) memperlihatkan bahwa kolaborasi pemerintah dengan perguruan tinggi dapat mendukung pencapaian SDGs desa ketika aparatur desa ikut terlibat dalam kemitraan. (Prabowo et al., 2021) juga menempatkan kerja sama dengan masyarakat dan pihak lain sebagai kebutuhan pembangunan desa karena pemerintah tidak dapat menjalankan seluruh kegiatan secara mandiri. (Haris et al., 2023) menunjukkan bahwa pengembangan ekonomi lokal dipengaruhi oleh kondisi awal dan desain kelembagaan. Kualitas kepemimpinan serta proses kolaborasi juga menentukan. Literatur tersebut memperlihatkan bahwa dukungan teknologi perlu berjalan bersama dengan penguatan hubungan kerja antaraktor.

Kolaborasi multipihak juga menghadapi persoalan karena para aktor membawa kewenangan dan kepentingan yang berbeda. (Artha et al., 2023) menemukan bahwa ketimpangan kekuasaan maupun sumber daya dapat menghambat kerja sama dalam pengelolaan limbah. (Salsabila et al., 2024) menekankan perlunya tata kelola adaptif yang membuka ruang kolaborasi antarpemangku kepentingan sekaligus memperkuat keterlibatan masyarakat. (Nederhand, 2021) menjelaskan bahwa kapasitas organisasi dan jaringan sosial memengaruhi hasil kolaborasi pemerintah dengan organisasi berbasis masyarakat. Legitimasi aktor serta kedudukannya dalam pengambilan keputusan juga turut menentukan. (Saputra & Wibawani, 2025) serta (Putri & Maesaroh, 2025) menunjukkan bahwa kolaborasi belum berjalan optimal ketika aturan kerja, interaksi antaraktor, dan desain kelembagaan masih menghadapi kendala. Kajian tersebut memperlihatkan bahwa keterlibatan banyak aktor belum cukup untuk menghasilkan kolaborasi yang efektif. Hubungan kerja antarpihak perlu jelas, sedangkan aturan kerja harus dipahami bersama agar sumber daya dapat dikelola tanpa menimbulkan ketimpangan.

Program pemberdayaan masyarakat tahun 2025 di Desa Sumbersari, Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan dilaksanakan oleh tim Universitas Negeri Surabaya melalui skema Program Mahasiswa Berdampak Tahun 2025 yang dikelola DPPM Kemdiktisaintek. Program mengembangkan integrasi pertanian dan peternakan berbasis ekonomi sirkular dengan KTT Sumber Rejeki dan Karang Taruna Desa Sumbersari sebagai kelompok sasaran, sedangkan Pemerintah Desa Sumbersari berkedudukan sebagai mitra pemerintah. Tim pelaksana UNESA berperan dalam transfer pengetahuan, penyediaan teknologi, pelatihan, dan pendampingan. Pemerintah desa memberi dukungan kelembagaan serta koordinasi lokal. KTT Sumber Rejeki menjalankan kegiatan produksi dan penerapan teknologi, sementara Karang Taruna mengambil bagian pada kegiatan pemuda, promosi digital, pemasaran, serta pengembangan eduwisata.

Perbedaan fungsi tersebut membuat keberlanjutan program bergantung pada hubungan kerja yang terbentuk antaraktor. Teknologi yang dibawa tim pelaksana UNESA memerlukan kemampuan KTT Sumber Rejeki untuk mengelola produksi dan penggunaan alat. Dukungan pemerintah desa diperlukan untuk menjaga koordinasi, sedangkan Karang Taruna memperluas keterlibatan pemuda dan pemasaran. Hubungan tersebut menjadi semakin penting ketika intensitas pendampingan perguruan tinggi berkurang. Kesepakatan mengenai fungsi, distribusi kewenangan, komunikasi, serta pertukaran sumber daya karena itu menjadi dasar untuk menelaah proses *collaborative governance* dalam program.

(Virnandasari & Mawardi, 2024) meneliti Program Lingkungan Peternakan Sapi Terintegrasi di Desa Sumbersari dan mencatat manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan dengan rasio *Social Return on Investment* sebesar 3,44 berdasarkan *present value* dan 3,87 berdasarkan *future value*. Hasil

Vol. 6, No. 6 -November 2026, Hal. 3892-3905
DOI: 10.59395/altifani.v6i6.1454

tersebut menunjukkan manfaat program, tetapi belum menjelaskan proses pembentukan kesepakatan dan pembagian tanggung jawab antaraktor. Aspek kepercayaan serta keberlanjutan kerja sama juga belum menjadi fokus kajian tersebut. Penelitian pemberdayaan desa selama ini banyak diarahkan pada ketahanan pangan dan pengembangan ekonomi lokal, sedangkan pengelolaan limbah kerap dibahas sebagai persoalan tersendiri. Ruang kajian masih terbuka untuk menjelaskan proses *collaborative governance* dalam program ekonomi sirkular yang mempertemukan perguruan tinggi dan pemerintah desa dengan kelompok tani ternak serta organisasi pemuda. Program pemberdayaan masyarakat di Desa Sumbersari dipilih karena mempertemukan keempat aktor tersebut dalam satu kegiatan pemberdayaan.

Kebaruan penelitian terletak pada analisis *collaborative governance* dalam satu program pemberdayaan berbasis ekonomi sirkular yang mempertemukan empat kelompok aktor. Perguruan tinggi membawa pengetahuan dan teknologi. Pemerintah desa menyediakan dukungan kelembagaan, sedangkan kelompok tani ternak memiliki pengalaman produksi. Organisasi pemuda berperan pada promosi dan pemasaran serta pengembangan eduwisata. Fokus analisis diarahkan pada hubungan antarpelaku selama program berjalan, bukan pada pengukuran keberhasilan produksi atau tingkat ketahanan pangan secara kuantitatif. Ketahanan pangan ditempatkan sebagai arah program yang didukung oleh pemanfaatan pupuk dan pakan berbasis sumber daya lokal. Posisi tersebut membedakan penelitian ini dari kajian yang lebih banyak menilai manfaat program atau membahas kolaborasi tanpa menelaah hubungan empat aktor dalam satu program pemberdayaan desa.

Karakter hubungan antaraktor dalam program tersebut memerlukan kerangka *collaborative governance* yang mampu menjelaskan proses kerja sama selama pelaksanaan program. (Ansell & Gash, 2007) menempatkan kondisi awal dan desain kelembagaan sebagai landasan pembentukan kolaborasi. Proses kolaboratif berkembang melalui kepemimpinan fasilitatif, dialog, kepercayaan, dan komitmen bersama. (Emerson et al., 2011) memperluas analisis dengan menjelaskan dinamika kolaborasi yang dapat menghasilkan tindakan bersama dan mendorong adaptasi. Kedua kerangka tersebut relevan untuk memahami pembentukan serta perkembangan kolaborasi secara menyeluruh. Penelitian ini lebih khusus menelaah hubungan kerja antaraktor selama program berlangsung. Perhatian diarahkan pada proses membangun kesepakatan dan membagi kewenangan. Komunikasi dan pertukaran sumber daya juga menjadi bagian analisis.

Kerangka *collaborative governance* (Saleh et al., 2021) dipilih karena empat nilai dasarnya sesuai dengan karakter program dan persoalan yang ditemukan di Desa Sumbersari. Universitas Negeri Surabaya dan Pemerintah Desa Sumbersari menjalankan fungsi yang berbeda dari Kelompok Tani Ternak Sumber Rejeki serta Karang Taruna. Perbedaan fungsi tersebut berkaitan dengan kewenangan dan sumber daya yang dimiliki masing-masing aktor. Temuan lapangan menunjukkan bahwa pembagian fungsi utama telah terbentuk, meskipun beberapa pengaturan teknis dan pola koordinasi masih menyesuaikan kondisi pelaksanaan. Keberlanjutan komunikasi serta pengelolaan sumber daya bersama juga menjadi bagian penting setelah intensitas pendampingan berkurang. Kondisi tersebut dapat dibaca melalui orientasi konsensus, kepemimpinan kolektif, komunikasi multiarah, dan berbagi sumber daya yang dikemukakan (Saleh et al., 2021). Kerangka ini digunakan untuk menjelaskan hubungan kerja empat aktor selama pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat berbasis ekonomi sirkular.

Pertanyaan penelitian dirumuskan sebagai berikut: bagaimana proses *collaborative governance* antaraktor dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Ekonomi Sirkular untuk mendukung ketahanan pangan di Desa Sumbersari Kabupaten Lamongan? Penelitian bertujuan menganalisis proses *collaborative governance* antaraktor berdasarkan empat nilai dasar (Saleh et al., 2021), yaitu orientasi konsensus, kepemimpinan kolektif, komunikasi multiarah, dan berbagi sumber daya. Arah penelitian mendukung *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya Tujuan 2 Tanpa Kelaparan dan Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh. Fokus penelitian juga selaras dengan Asta Cita kedua dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun

Vol. 6, No. 6 -November 2026, Hal. 3892-3905
DOI: 10.59395/altifani.v6i6.1454

2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 yang menempatkan swasembada pangan sebagai bagian dari agenda kemandirian nasional.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan desain studi kasus. Pendekatan tersebut dipilih untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai proses *collaborative governance* berdasarkan interaksi dan hubungan antaraktor selama pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Ekonomi Sirkular di Desa Sumbersari, Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan. Desain studi kasus digunakan karena penelitian berfokus pada satu program yang berlangsung pada lokasi tertentu dan melibatkan beberapa aktor dengan peran berbeda. Pengumpulan data penelitian dilaksanakan pada Agustus 2026. Informan ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling* berdasarkan keterlibatan, pengetahuan, dan pengalaman langsung dalam pelaksanaan program. Informan penelitian berjumlah 16 orang yang merepresentasikan empat kelompok aktor. Tim pelaksana Universitas Negeri Surabaya terdiri atas satu dosen ketua pelaksana dan tiga mahasiswa pelaksana. Pemerintah Desa Sumbersari diwakili oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kasi, dan Kaur. KTT Sumber Rejeki diwakili oleh sekretaris, bendahara, anggota, dan pengelola kandang, sedangkan Karang Taruna Desa Sumbersari diwakili oleh ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semiterstruktur, observasi, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk menggali pengalaman serta pandangan informan mengenai proses kerja sama antaraktor. Observasi diarahkan pada pelaksanaan kegiatan dan hubungan kerja di lapangan, sedangkan dokumentasi digunakan untuk melengkapi informasi melalui laporan program, dokumen kegiatan, dan bukti pelaksanaan kegiatan. Analisis data menggunakan model interaktif (Miles et al., 2014) yang meliputi pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Data yang telah dikumpulkan kemudian dikelompokkan berdasarkan empat nilai *collaborative governance* (Saleh et al., 2021), yaitu orientasi konsensus, kepemimpinan kolektif, komunikasi multiarah, dan berbagi sumber daya. Keabsahan data diperiksa melalui triangulasi sumber dan teknik (Carter et al., 2014). Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari keempat kelompok aktor. Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk melihat konsistensi temuan penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *collaborative governance* dalam program pemberdayaan masyarakat berbasis ekonomi sirkular di Desa Sumbersari terbentuk melalui hubungan kerja yang saling bergantung antarpihak. Tim pelaksana Universitas Negeri Surabaya (UNESA) menjadi pengusul program sekaligus membawa pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan dalam pendampingan. Pemerintah Desa Sumbersari memperkuat pelaksanaan melalui dukungan kelembagaan serta koordinasi lokal. Kelompok Tani Ternak (KTT) Sumber Rejeki menjadi ruang utama penerapan teknologi karena kegiatan produksi memang berlangsung di kelompok tersebut. Karang Taruna mengambil bagian pada kegiatan pemuda dan pengembangan pemasaran digital. Hasil triangulasi wawancara, observasi, serta dokumentasi memperlihatkan pola yang relatif konsisten pada empat nilai dasar (Saleh et al., 2021). Orientasi konsensus terlihat dari penyesuaian rancangan kegiatan terhadap kebutuhan mitra. Kepemimpinan terbagi antara arah strategis yang masih kuat pada tim pelaksana UNESA dan keputusan operasional yang semakin banyak dijalankan oleh aktor desa. Komunikasi berlangsung secara langsung maupun daring. Berbagi sumber daya menjadi unsur yang paling nyata karena setiap pihak membawa kapasitas berbeda untuk mendukung kegiatan bersama. Perbedaan karakter pada setiap dimensi menjadi dasar untuk membaca perkembangan kolaborasi secara lebih proporsional.

Vol. 6, No. 6 -November 2026, Hal. 3892-3905
DOI: 10.59395/altifani.v6i6.1454

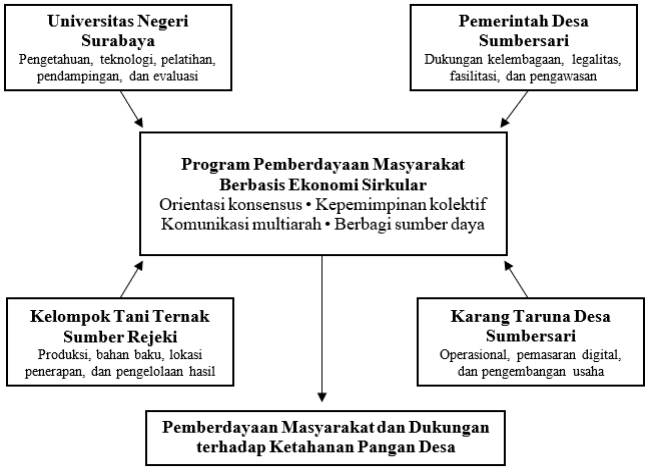

Gambar 2. Konfigurasi *Collaborative Governance* dalam Program Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sumbersari
Sumber: Hasil wawancara dan dokumentasi program, diolah penulis (2026)

Konfigurasi pada Gambar 2 menunjukkan bahwa program tidak berjalan sebagai hubungan satu arah dari perguruan tinggi kepada masyarakat. Tim pelaksana UNESA memang menjadi penggerak awal, tetapi teknologi yang dibawa baru dapat diterapkan setelah tersedia dukungan dari mitra. KTT Sumber Rejeki menyediakan ruang produksi sekaligus pengetahuan mengenai kondisi peternakan. Pemerintah desa membantu koordinasi pada tingkat lokal. Karang Taruna membuka ruang keterlibatan pemuda melalui promosi dan pengembangan potensi desa. Hubungan tersebut memperlihatkan ketergantungan fungsional antarpihak karena keberhasilan satu kegiatan bertumpu pada kemampuan aktor lain menjalankan fungsi yang berbeda. Rancangan awal berasal dari tim pelaksana UNESA, sedangkan penerapannya harus menyesuaikan kondisi KTT Sumber Rejeki serta kebutuhan masyarakat desa. Pemetaan fungsi seperti ini membantu menunjukkan hubungan antarlembaga dalam pelaksanaan program publik sebagaimana juga digunakan oleh (Jamal & Iztighfari, 2026). Kasus Sumbersari memperlihatkan bahwa ketergantungan tersebut tetap berlangsung ketika pendampingan perguruan tinggi berkurang dan tanggung jawab harian semakin banyak berada pada aktor lokal.

Berdasarkan hasil triangulasi sumber dan teknik, temuan penelitian kemudian dikelompokkan berdasarkan empat dimensi *collaborative governance* sebagaimana diungkapkan oleh (Saleh et al., 2021) yang dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Ringkasan Temuan *Collaborative Governance* dalam Program Pemberdayaan Masyarakat

Dimensi	Temuan Hasil Triangulasi	Interpretasi Analitis
Orientasi konsensus	Arah program berasal dari tim pelaksana UNESA, lalu disesuaikan melalui survei dan komunikasi dengan mitra. Keempat kelompok aktor memahami tujuan umum dan pembagian peran. Urusan teknis, terutama penggunaan serta perawatan alat, masih banyak disesuaikan dengan kondisi lapangan.	Konsensus telah terbentuk pada tujuan dan pembagian fungsi. Pelaksanaan operasional bersifat adaptif dan belum seluruhnya tergambar sebagai prosedur yang formal
Kepemimpinan kolektif	Arah strategis lebih banyak berada pada ketua tim dosen. Koordinasi lapangan dijalankan mahasiswa bersama mitra. Pemerintah desa memfasilitasi koordinasi lokal, KTT Sumber Rejeki mengatur produksi, dan Karang Taruna mengoordinasikan peran pemuda.	Kepemimpinan bersifat bertingkat dan terdistribusi berdasarkan bidang kerja. Pusat arahan strategis masih berada pada tim pelaksana UNESA, sedangkan kendali operasional semakin berada pada aktor lokal.
Komunikasi multiarah	Komunikasi dilakukan melalui pertemuan langsung dan media daring. Informasi bergerak dua arah dan dikonfirmasi kembali ketika terdapat perbedaan. Setelah program	Komunikasi multiarah telah berjalan dan mendukung koordinasi. Keberlanjutannya bergantung pada pemeliharaan kanal komunikasi setelah

Vol. 6, No. 6 -November 2026, Hal. 3892-3905
DOI: 10.59395/altifani.v6i6.1454

Dimensi	Temuan Hasil Triangulasi	Interpretasi Analitis
	utama selesai, intensitas komunikasi menurun tetapi salurannya tetap terbuka.	intensitas pendampingan menurun.
Berbagi sumber daya	Tim pelaksana UNESA menyediakan pengetahuan, teknologi, pelatihan, dan pendampingan. Pemerintah desa memberi dukungan kelembagaan. KTT Sumber Rejeki menyediakan lokasi, bahan, pengalaman, dan tenaga produksi. Karang Taruna menyumbang keterlibatan pemuda, promosi, konten, serta kemampuan digital.	Menjadi dimensi paling kuat karena memiliki bukti implementasi yang paling konkret dibandingkan dimensi lain melalui pemanfaatan teknologi, peningkatan kapasitas produksi, penguatan kemampuan teknis, dan pengembangan pemasaran.

Sumber: Diolah penulis (2026)

Ringkasan tersebut menunjukkan bahwa keempat dimensi telah muncul dalam pelaksanaan program, tetapi dengan tingkat perkembangan yang berbeda. Uraian berikut membahas setiap dimensi secara lebih mendalam berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Orientasi Konsensus

Orientasi konsensus mulai terbentuk sebelum kegiatan utama dilaksanakan. Ketua tim dosen pelaksana menjelaskan bahwa penyusunan program diawali dengan survei dan wawancara, kemudian dilanjutkan melalui pengamatan terhadap potensi serta persoalan mitra. Pemerintah Desa Sumbersari menguatkan bahwa kebutuhan KTT Sumber Rejeki berkaitan terutama dengan pengolahan limbah dan peningkatan produksi. Karang Taruna pada sisi lain memerlukan ruang keterlibatan yang lebih produktif bagi pemuda. Keterangan KTT Sumber Rejeki menunjukkan bahwa kebutuhan kelompok tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi, tetapi juga perbaikan pencatatan usaha dan perluasan pemasaran. Karang Taruna memberikan gambaran serupa dari sisi pemuda karena kegiatan digital serta pengembangan EduFarm disesuaikan dengan peran yang mampu mereka jalankan. Kesamaan informasi dari empat kelompok aktor menunjukkan bahwa kebutuhan mitra masuk dalam proses penentuan kegiatan, meskipun sumber inisiatif program tetap berasal dari tim pelaksana UNESA. Temuan tersebut diperkuat oleh Tomi Isdianto selaku Sekretaris Desa Sumbersari yang menyatakan, “Kalau ada masukan yang berbeda biasanya kami komunikasikan lagi. Tidak semua kebutuhan bisa dijalankan dengan cara yang sama, jadi dilihat dulu mana yang menjadi prioritas program dan mana yang bisa dikerjakan oleh mitra.”

Posisi para aktor tidak sepenuhnya setara sejak tahap perumusan awal. Tim mahasiswa pelaksana menyatakan bahwa arah umum program telah mendapat arahan dari ketua tim dosen. Bentuk kegiatan kemudian dikomunikasikan kembali dan disesuaikan dengan kondisi desa. Perbedaan usulan dibahas bersama pihak yang memahami persoalan lapangan, sedangkan keputusan yang dapat mengubah arah utama program tetap dikonsultasikan kepada ketua tim dosen. Pembagian fungsi utama juga relatif dipahami bersama. Tim pelaksana UNESA menjalankan pendampingan dan menyediakan teknologi. Pemerintah desa mengambil fungsi koordinatif, sementara KTT Sumber Rejeki menangani produksi serta penggunaan alat. Karang Taruna bergerak pada kegiatan pemuda dan pemasaran. Beberapa urusan teknis di KTT Sumber Rejeki tetap bersifat fleksibel. Pengoperasian alat, misalnya, menyesuaikan petugas yang tersedia dan telah mampu menjalankannya. Kebutuhan perawatan dibicarakan kembali sesuai kondisi mesin. Fleksibilitas tersebut lebih tepat dibaca sebagai penyesuaian operasional daripada ketiadaan konsensus karena setiap aktor tetap memahami bagian utamanya.

(Saleh et al., 2021) menempatkan orientasi konsensus sebagai nilai dasar karena kolaborasi membutuhkan keputusan yang dapat mempertemukan kepentingan para aktor. Temuan di Sumbersari menunjukkan bahwa titik temu telah terbentuk pada upaya memanfaatkan potensi pertanian-peternakan sekaligus memperkuat kapasitas kelompok. Manfaat ekonomi program menjadi kepentingan lain yang mempertemukan para pihak. (Rahaju et al., 2018) menekankan pentingnya kesepakatan kerja dalam hubungan kolaboratif. (Agita et al., 2025) menunjukkan bahwa dukungan teknologi perlu disertai penguatan kapasitas pengelola, sedangkan (Lu et al., 2023)

Vol. 6, No. 6 -November 2026, Hal. 3892-3905
DOI: 10.59395/altifani.v6i6.1454

menekankan pentingnya kesepakatan tujuan dalam kolaborasi sistem pangan lokal. Persoalan konsensus tidak lagi terutama terletak pada penerimaan terhadap tujuan program, melainkan pada kemampuan menjaga pembagian tanggung jawab teknis ketika pendampingan tim pelaksana UNESA berkurang. Konsensus pada tahap keberlanjutan dapat dilihat dari kemampuan aktor lokal mengatur produksi dan penggunaan alat. Kemampuan menyelesaikan kendala tanpa selalu menunggu arahan perguruan tinggi juga menjadi bagian penting dari proses tersebut.

Kepemimpinan Kolektif

Hasil wawancara menunjukkan bahwa kepemimpinan program bekerja melalui dua tingkat. Arah strategis masih kuat berada pada ketua tim dosen pelaksana karena program diusulkan dan dirancang oleh tim pelaksana UNESA. Ketua pelaksana mahasiswa bersama koordinator lapangan kemudian menerjemahkan arah tersebut ke dalam koordinasi sehari-hari. Keputusan teknis yang dapat diselesaikan di lokasi tidak harus menunggu dosen. Mahasiswa terlebih dahulu membahas persoalan bersama pihak terkait. Masalah yang dapat memengaruhi substansi program baru dikonsultasikan kembali kepada ketua tim dosen. Pola yang sama terlihat dari keterangan aktor desa. Pemerintah desa memfasilitasi koordinasi lokal. KTT Sumber Rejeki lebih berwenang pada kegiatan produksi karena memahami kondisi alat dan ritme kerja kelompok. Karang Taruna mengatur keterlibatan anggotanya pada kegiatan pemuda serta pemasaran. Kewenangan karena itu bergerak mengikuti bidang kerja dan pengetahuan masing-masing aktor, bukan terpusat pada satu organisasi. Posisi strategis tim pelaksana UNESA tercermin dalam keterangan Lutfi Saksono, “Kalau arah program secara umum memang tetap kami pegang sebagai tim dosen karena programnya kami yang mengusulkan”.

Perubahan pola kepemimpinan semakin terlihat setelah kegiatan utama tim pelaksana UNESA selesai. Tim mahasiswa tidak lagi intens berada di desa dan tim dosen pelaksana bergeser pada fungsi *monitoring* serta komunikasi lanjutan. KTT Sumber Rejeki tetap menjalankan produksi sekaligus menggunakan alat yang telah tersedia. Karang Taruna masih memiliki ruang untuk meneruskan promosi digital dan kegiatan pemuda. Pemerintah desa tetap membantu koordinasi serta memantau perkembangan program pada tingkat lokal. Tanggung jawab harian karena itu tidak berpindah kepada satu lembaga tertentu, tetapi kembali kepada kelompok sesuai fungsi yang telah dijalankan. Hubungan dengan tim pelaksana UNESA tetap dipertahankan sebagai jalur konsultasi apabila muncul kendala yang tidak dapat diselesaikan sendiri. Pola tersebut menunjukkan adanya proses pemindahan pusat kendali operasional kepada aktor lokal tanpa memutus hubungan dengan perguruan tinggi.

(Saleh et al., 2021) memandang kepemimpinan kolektif sebagai pembagian tanggung jawab yang memungkinkan beberapa aktor berkontribusi pada tujuan bersama. Temuan penelitian menunjukkan pola kepemimpinan yang bertingkat: tim pelaksana UNESA lebih dominan pada arah strategis, sedangkan pelaksanaan operasional telah terdistribusi pada mahasiswa dan aktor desa. (Fanida & Ladiqi, 2024) menunjukkan pentingnya hubungan berkelanjutan antara perguruan tinggi dan aktor desa, sedangkan (Prabowo et al., 2021) menempatkan pembagian peran sebagai bagian penting tata kelola pembangunan desa. (Az-zahra & Karmila, 2026) serta (Orbawati & Mukti, 2023) menunjukkan bahwa penguatan peran aktor lokal dapat didukung oleh kepemimpinan yang fasilitatif dan pembagian kewenangan sesuai fungsi masing-masing. Perbandingan tersebut memperkuat pembacaan bahwa kepemimpinan di Sumbersari telah bergerak menuju distribusi kewenangan, meskipun sumber inisiatif strategis masih berasal dari perguruan tinggi. Kemandirian lokal dalam program ini lebih terlihat pada pelaksanaan operasional, ketika aktor desa menjalankan fungsi produksi, pemasaran, dan koordinasi sesuai perannya masing-masing, sedangkan fungsi strategis dan penguatan kapasitas masih melibatkan tim pelaksana UNESA. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberlanjutan kolaborasi tidak bergantung pada hilangnya peran perguruan tinggi, tetapi pada kemampuan aktor lokal mempertahankan fungsi dan koordinasi setelah intensitas pendampingan berkurang.

Vol. 6, No. 6 -November 2026, Hal. 3892-3905
DOI: 10.59395/altifani.v6i6.1454

Komunikasi Multiarah

Komunikasi antarpihak berlangsung melalui pertemuan langsung maupun media daring. Mahasiswa yang berada di lokasi menjadi penghubung penting selama kegiatan berjalan, sedangkan dosen tetap melakukan kunjungan dan berkomunikasi dengan aktor desa ketika diperlukan. Tim mahasiswa pelaksana menggunakan rapat daring apabila anggota tidak dapat berkumpul pada waktu yang sama. KTT Sumber Rejeki memanfaatkan pertemuan di kandang dan WhatsApp untuk membahas kebutuhan produksi ataupun penggunaan alat. Pemerintah desa dapat berhubungan langsung dengan kelompok karena berada pada wilayah yang sama. Karang Taruna melakukan koordinasi ketika terdapat kegiatan pemuda atau pemasaran. Keberadaan beberapa saluran tersebut membuat komunikasi tidak bergantung pada satu orang maupun satu forum. Informasi dapat bergerak melalui mahasiswa, pengurus kelompok, pemerintah desa, maupun tim pelaksana UNESA sesuai persoalan yang dihadapi.

Arus informasi bersifat multiarah karena aktor desa tidak hanya menerima arahan dari tim pelaksana UNESA. KTT Sumber Rejeki dapat menyampaikan kebutuhan produksi atau kendala penggunaan alat, sementara Karang Taruna memiliki ruang untuk menyampaikan gagasan mengenai kegiatan pemuda dan pemasaran. Pemerintah desa memberikan masukan terkait pengembangan maupun keberlanjutan kegiatan, sedangkan tim pelaksana UNESA menerima masukan maupun kendala dari mitra untuk ditindaklanjuti sesuai kebutuhan. Informasi yang belum sama dikonfirmasi kembali kepada pihak yang paling memahami persoalan sebelum keputusan diteruskan. Keterangan dari keempat kelompok aktor menunjukkan bahwa komunikasi selama program utama berlangsung relatif lancar dan terbuka. Setelah pendampingan berkurang, frekuensi komunikasi dengan tim pelaksana UNESA memang menurun, tetapi salurannya tetap tersedia ketika dibutuhkan.

(Saleh et al., 2021) menjelaskan komunikasi multiarah sebagai pertukaran informasi yang memberi kesempatan kepada aktor untuk menyampaikan pandangan dan memengaruhi pelaksanaan kegiatan. Pola di Sumbersari memenuhi ciri tersebut karena informasi bergerak dari tim pelaksana UNESA menuju mitra, dari aktor desa menuju tim pelaksana UNESA, serta antarpihak sesuai kebutuhan. (Rahaju et al., 2018) menempatkan pertukaran informasi sebagai bagian penting hubungan antarlembaga. (Saputra & Wibawani, 2025) menunjukkan bahwa sosialisasi dan aturan kerja yang tidak jelas dapat menghambat kolaborasi, sedangkan (Sihaloho & Rusliadi, 2025) menemukan bahwa rendahnya partisipasi masyarakat serta tumpang tindih kewenangan dapat melemahkan pengelolaan limbah. Kondisi di Sumbersari menunjukkan persoalan yang berbeda. Tantangannya bukan terletak pada ketiadaan saluran komunikasi, tetapi pada kemampuan mempertahankan komunikasi yang telah terbentuk setelah intensitas pendampingan perguruan tinggi berkurang.

Keempat dimensi *collaborative governance* menunjukkan karakter capaian yang berbeda dalam pelaksanaan program. Orientasi konsensus terlihat dari kemampuan aktor menyepakati tujuan program, menyesuaikan kegiatan dengan kebutuhan mitra, dan membangun pembagian fungsi antaraktor. Kepemimpinan kolektif terlihat dari distribusi kewenangan antara tim pelaksana UNESA, pemerintah desa, KTT Sumber Rejeki, dan Karang Taruna dalam menjalankan fungsi masing-masing. Komunikasi multiarah terlihat dari keberadaan mekanisme pertukaran informasi melalui pertemuan langsung maupun media daring. Berbagi sumber daya menunjukkan posisi yang lebih kuat dibandingkan dimensi lainnya karena tidak hanya menggambarkan proses hubungan antaraktor, tetapi juga menghasilkan bentuk implementasi yang dapat diamati melalui penerapan teknologi, peningkatan kapasitas produksi, penguatan kemampuan teknis, serta pengembangan pemasaran. Penentuan berbagi sumber daya sebagai dimensi paling kuat tidak didasarkan pada pengukuran kuantitatif antar dimensi, tetapi pada tingkat keterlihatan implementasi kolaborasi yang dihasilkan dari pertukaran sumber daya antaraktor. Penilaian terhadap dimensi paling kuat dalam penelitian ini merujuk pada tingkat keterwujudan hasil kolaborasi yang dapat diamati melalui perubahan kapasitas dan pelaksanaan kegiatan, bukan berdasarkan perbandingan nilai atau skor antar dimensi.

Vol. 6, No. 6 -November 2026, Hal. 3892-3905
DOI: 10.59395/altifani.v6i6.1454

Berbagi Sumber Daya

Berbagi sumber daya menjadi dimensi paling kuat dalam *collaborative governance* program pemberdayaan masyarakat di Desa Sumbersari karena menunjukkan hubungan langsung antara kontribusi aktor dan capaian implementasi program. Tim pelaksana UNESA berkontribusi melalui transfer pengetahuan, penyediaan teknologi, pelatihan, dan pendampingan penerapan teknologi di lapangan. Pemerintah Desa Sumbersari memperkuat pelaksanaan program melalui dukungan kelembagaan dan fasilitasi akses kepada kelompok masyarakat. KTT Sumber Rejeki menyediakan sumber daya lokal berupa lokasi penerapan teknologi, bahan baku dari aktivitas peternakan, serta pengalaman anggota dalam pengelolaan usaha peternakan. Karang Taruna berkontribusi melalui keterlibatan pemuda, kemampuan digital, promosi, dan pengembangan EduFarm sebagai bagian dari strategi pengenalan program kepada masyarakat.

Pertukaran sumber daya dalam program tidak berhenti pada penyerahan fasilitas, tetapi berkembang menjadi proses pemanfaatan bersama antaraktor. Mesin pengolahan limbah yang diberikan oleh tim pelaksana UNESA diterapkan di lokasi KTT Sumber Rejeki dengan memanfaatkan bahan baku yang tersedia dari aktivitas peternakan dan pertanian setempat. Pengetahuan mengenai pengoperasian teknologi diberikan melalui kegiatan pelatihan dan pendampingan, kemudian diterapkan oleh anggota kelompok dalam kegiatan produksi. Pembagian peran antaraktor juga menunjukkan penyesuaian berdasarkan kapasitas masing-masing pihak. KTT Sumber Rejeki berperan sebagai pelaksana utama kegiatan produksi karena memiliki pengalaman dalam pengelolaan peternakan, sedangkan Karang Taruna diarahkan pada kegiatan promosi digital dan pengembangan EduFarm sesuai dengan kapasitas pemuda dalam bidang teknologi informasi. Pemerintah desa berperan dalam mendukung koordinasi dan pemantauan keberlanjutan kegiatan tanpa mengambil alih pengelolaan program.

Data capaian program diperoleh dari laporan kemajuan kegiatan yang disusun oleh tim pelaksana UNESA selama periode pelaksanaan program. Peningkatan kapasitas produksi dibandingkan berdasarkan kondisi awal sebelum penerapan teknologi dan kondisi setelah kegiatan pendampingan berlangsung. Laporan kemajuan program mencatat produksi pupuk organik meningkat dari rata-rata sekitar 20 kg menjadi minimal 50 kg per hari. Efisiensi proses produksi terlihat dari pengurangan waktu kerja produksi dari sekitar 8 jam menjadi 4 jam berdasarkan informasi yang diperoleh melalui wawancara dengan pengelola KTT Sumber Rejeki. Perubahan tersebut menunjukkan adanya penghematan waktu kerja setelah penerapan teknologi. Wawancara dengan informan KTT Sumber Rejeki menunjukkan bahwa aktivitas produksi masih berlangsung dengan frekuensi sekitar dua sampai tiga kali seminggu sesuai permintaan yang ada. Temuan tersebut menunjukkan keberlangsungan aktivitas produksi setelah pelaksanaan program, meskipun keberlanjutan program secara menyeluruh tetap dipengaruhi oleh keterlibatan dan koordinasi antaraktor. Keberlanjutan pengelolaan ditegaskan oleh informan KTT Sumber Rejeki yang menyatakan, “Alat dan hasilnya tetap dikelola dari sini.”

Berbagi sumber daya juga menghasilkan penguatan nonteknis. Dokumen program mencatat adanya pelatihan manajemen serta pencatatan keuangan. Kelompok juga dikenalkan pada penyusunan *business plan* dan *Business Model Canvas*. Kegiatan lain diarahkan pada transaksi daring serta keterlibatan pemuda dalam AgroYouth dan EduFarm. KTT Sumber Rejeki menyebut pencatatan usaha dan pemasaran sebagai kebutuhan penting selain mesin. Karang Taruna memperoleh ruang belajar pada pemasaran digital serta pengelolaan potensi desa. Pemerintah desa melihat keterlibatan pemuda sebagai bagian dari pengembangan lokal yang perlu dipertahankan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa sumber daya yang dipertukarkan tidak hanya berbentuk alat. Pengetahuan dan pengalaman memiliki fungsi yang sama pentingnya dalam menopang pelaksanaan. Jaringan, tenaga lokal, dukungan kelembagaan, serta kemampuan digital menunjukkan bahwa sumber daya dalam kolaborasi tidak terbatas pada aset fisik, tetapi juga mencakup kapasitas sosial dan pengetahuan antaraktor. Ringkasan kondisi awal dan capaian program disajikan pada Tabel 2.

Vol. 6, No. 6 -November 2026, Hal. 3892-3905
DOI: 10.59395/altifani.v6i6.1454

Tabel 2. Capaian Program dan Keterkaitannya dengan Berbagi Sumber Daya

Indikator	Kondisi Awal	Capaian yang Dilaporkan	Keterkaitan dengan Berbagi Sumber Daya
Kapasitas produksi pupuk organik	Rata-rata sekitar 20 kg per hari	Laporan kemajuan program tim pelaksana UNESA mencatat peningkatan kapasitas produksi menjadi minimal 50 kg per hari	Teknologi dan pengetahuan dari tim pelaksana UNESA digunakan bersama sumber daya KTT Sumber Rejeki
Efisiensi proses produksi	Pengolahan masih banyak dilakukan secara manual	Berdasarkan wawancara dengan pengelola KTT Sumber Rejeki, durasi proses produksi berkurang dari sekitar 8 jam menjadi 4 jam setelah penerapan teknologi	Penerapan teknologi membantu mengurangi waktu kerja dalam proses produksi
Kemampuan teknis lokal	Kemampuan merawat dan memperbaiki mesin masih terbatas	Hasil wawancara informan KTT dan observasi lapangan menunjukkan bahwa 3 anggota kelompok telah mampu merawat serta memperbaiki TTG	Transfer pengetahuan mendukung keberlanjutan penggunaan alat
Jangkauan pemasaran	Pemasaran masih terbatas	Laporan program tim pelaksana UNESA mencatat jangkauan pemasaran minimal 5 kabupaten. Wawancara KTT Sumber Rejeki menunjukkan pemasaran telah menjangkau sembilan wilayah di Jawa Timur (Lamongan, Gresik, Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, Jombang, Tuban, Malang, dan Bojonegoro), meskipun tidak seluruhnya memiliki permintaan rutin	Kontribusi KTT Sumber Rejeki dan Karang Taruna memperluas jaringan pemasaran
Transaksi digital	Pemasaran daring belum terstruktur	Laporan kemajuan program tim pelaksana UNESA mencatat 10 transaksi daring dan pengembangan satu platform pemasaran digital	Pelatihan pemasaran memberi ruang lebih besar bagi peran pemuda
Penguatan manajemen usaha	Pencatatan dan perencanaan usaha belum tertata	Wawancara dan dokumentasi kegiatan menunjukkan adanya pendampingan pencatatan keuangan, penyusunan *business plan*, *Business Model Canvas*, dan pengembangan produk	Berbagi sumber daya tidak hanya menghasilkan teknologi, tetapi juga penguatan pengelolaan usaha
Pemberdayaan pemuda	Keterlibatan pemuda dalam kegiatan produktif masih rendah	Wawancara dengan Karang Taruna menunjukkan saat ini keterlibatan 5 pemuda dalam promosi digital serta pengembangan AgroYouth dan EduFarm	Karang Taruna memperoleh ruang peran yang berbeda dari KTT Sumber Rejeki dan lebih dekat dengan promosi serta eduwisata

Sumber: Diolah penulis berdasarkan laporan kemajuan program tim pelaksana UNESA tahun 2025 dan hasil wawancara dengan KTT Sumber Rejeki pada penelitian lapangan tahun 2026.

Capaian pada Tabel 2 memperlihatkan bahwa berbagi sumber daya tidak berhenti pada pertukaran fasilitas, tetapi menghasilkan perubahan yang dapat diamati dalam pelaksanaan program. Data capaian tersebut dipahami sebagai luaran program yang bersumber dari laporan kegiatan dan dikonfirmasi melalui informasi lapangan, bukan sebagai hasil pengukuran eksperimental terhadap perubahan kapasitas produksi. Kerangka (Saleh et al., 2021) menempatkan berbagi sumber daya sebagai unsur penting karena setiap aktor memiliki keterbatasan sekaligus kapasitas yang dapat melengkapi pihak lain. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kekuatan program Sumbersari berada pada kemampuan mempertemukan teknologi perguruan tinggi dengan sumber daya lokal yang telah tersedia. (Wijaya et al., 2019) menunjukkan bahwa kemitraan dapat memperkuat kapasitas masyarakat sekaligus membuka akses usaha. (Vazquez-brust, 2020) menjelaskan bahwa hasil kolaborasi dipengaruhi oleh pembagian kewenangan serta pola koordinasi yang sesuai dengan karakter mitra. Kondisi di Sumbersari memperkuat kedua pandangan tersebut. Teknologi baru memiliki nilai ketika dapat diterapkan oleh kelompok lokal dan didukung oleh kapasitas yang sudah ada di desa. Dukungan kelembagaan pemerintah desa membantu menjaga koordinasi, sedangkan kemampuan pemasaran memperluas manfaat kegiatan. Keberlanjutan program karena itu

Vol. 6, No. 6 -November 2026, Hal. 3892-3905
DOI: 10.59395/altifani.v6i6.1454

bergantung pada kemampuan setiap aktor mempertahankan fungsi yang telah terbentuk tanpa mengembalikan kendali harian kepada tim pelaksana UNESA.

Capaian tersebut perlu dibaca sebagai luaran program yang tercatat dalam laporan kemajuan dan diperkuat secara terbatas oleh hasil wawancara, bukan sebagai bukti tunggal bahwa ketahanan pangan Desa Sumbersari telah meningkat secara langsung. Peningkatan produksi pupuk organik dan pemanfaatan limbah pertanian sebagai pakan menunjukkan adanya penguatan kapasitas produksi lokal. Efisiensi tenaga kerja serta perluasan pemasaran juga memperlihatkan manfaat yang mendukung keberlanjutan kegiatan. Kontribusi terhadap ketahanan pangan dalam penelitian ini dipahami secara tidak langsung melalui penguatan ketersediaan input produksi, kapasitas pengelolaan sumber daya lokal, dan keberlanjutan sistem produksi pertanian-peternakan di desa. Penelitian ini tidak mengukur status pangan rumah tangga, konsumsi gizi, maupun prevalensi kerawanan pangan secara langsung.

Implikasi Kolaborasi terhadap Pemberdayaan dan Ketahanan Pangan

Sintesis empat dimensi menunjukkan bahwa *collaborative governance* dalam program pemberdayaan masyarakat di Desa Sumbersari telah membentuk pembagian kerja lintas aktor yang lebih kompleks daripada hubungan pemberi dan penerima bantuan. Orientasi konsensus membantu menyesuaikan rancangan program dengan kebutuhan mitra. Kepemimpinan kolektif membedakan arah strategis dari pengelolaan operasional, sedangkan komunikasi multiarah memberi ruang bagi kebutuhan maupun kendala untuk disampaikan antaraktor. Berbagi sumber daya mempertemukan teknologi tim pelaksana UNESA dengan kapasitas yang telah dimiliki desa. KTT Sumber Rejeki tidak hanya menerima teknologi, tetapi tetap menggunakannya dalam kegiatan produksi. Karang Taruna memperoleh ruang pada kegiatan pemuda dan promosi, sementara Pemerintah Desa Sumbersari tetap menjalankan fungsi koordinatif. Berkurangnya intensitas pendampingan tim pelaksana UNESA kemudian menunjukkan adanya peralihan pengelolaan operasional kepada aktor lokal tanpa memutus hubungan konsultatif dengan perguruan tinggi.

Kontribusi terhadap ketahanan pangan Desa Sumbersari bersifat tidak langsung dan terutama terlihat melalui penguatan sistem produksi lokal. Pengolahan limbah ternak menjadi pupuk mendukung ketersediaan input pertanian, sedangkan pemanfaatan bahan pertanian sebagai pakan membantu efisiensi usaha peternakan. Pemanfaatan teknologi memperbaiki proses pengolahan, sementara pengembangan pemasaran membuka peluang peningkatan nilai ekonomi bagi kelompok. Secara keseluruhan, berbagi sumber daya menjadi dimensi *collaborative governance* yang paling kuat karena menghasilkan implementasi kolaborasi paling konkret melalui integrasi teknologi, pengetahuan, dukungan kelembagaan, pengalaman produksi, dan kemampuan pemasaran antaraktor. Orientasi konsensus dan komunikasi multiarah telah terbentuk melalui penyesuaian program serta interaksi antaraktor, sedangkan kepemimpinan menunjukkan pola bertingkat antara arah strategis tim pelaksana UNESA dan pengelolaan operasional oleh aktor lokal.

Berbeda dengan sebagian penelitian terdahulu yang lebih banyak menyoroti hasil program pemberdayaan atau manfaat ekonomi dari pengelolaan sumber daya lokal, penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan program ekonomi sirkular di tingkat desa juga dipengaruhi oleh mekanisme *collaborative governance* yang mengatur pembagian peran, pertukaran sumber daya, dan koordinasi antaraktor. Kasus Desa Sumbersari memperlihatkan bahwa integrasi kapasitas teknologi perguruan tinggi, dukungan kelembagaan pemerintah desa, pengalaman produksi kelompok ternak, serta keterlibatan pemuda membentuk pola kolaborasi yang mendukung penguatan sistem produksi lokal. Temuan ini menegaskan bahwa pengembangan ekonomi sirkular berbasis masyarakat tidak hanya bergantung pada penyediaan teknologi, tetapi juga pada kemampuan aktor yang terlibat dalam mengelola hubungan kolaboratif selama pelaksanaan program.

Vol. 6, No. 6 -November 2026, Hal. 3892-3905
DOI: 10.59395/altifani.v6i6.1454

4. KESIMPULAN

Collaborative governance dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Ekonomi Sirkular di Desa Sumbersari terbentuk melalui hubungan kerja empat aktor yang saling melengkapi sesuai kapasitasnya. Orientasi konsensus berkembang melalui penyesuaian program terhadap kebutuhan mitra, sedangkan kepemimpinan menunjukkan pola bertingkat antara arah strategis tim pelaksana UNESA dan pengelolaan operasional oleh aktor lokal. Komunikasi multiarah berlangsung melalui interaksi langsung maupun daring, sementara berbagi sumber daya menjadi dimensi paling kuat karena menghasilkan implementasi kolaborasi yang paling konkret melalui integrasi teknologi, pengetahuan, dukungan kelembagaan, pengalaman produksi, dan kemampuan pemasaran antaraktor. Temuan tersebut menunjukkan adanya pergeseran sebagian fungsi operasional kepada aktor lokal melalui keterlibatan KTT Sumber Rejeki, Pemerintah Desa Sumbersari, dan Karang Taruna dalam pelaksanaan kegiatan. Namun, tim pelaksana UNESA masih memiliki peran penting dalam aspek strategis, pendampingan teknologi, dan penguatan kapasitas tertentu. Kolaborasi ini memperkuat sistem produksi lokal yang berpotensi mendukung ketahanan pangan secara tidak langsung.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Desa Sumbersari, Kelompok Tani Ternak Sumber Rejeki, Karang Taruna Desa Sumbersari, serta seluruh informan yang telah memberikan dukungan dan informasi selama pelaksanaan penelitian. Apresiasi juga disampaikan kepada Universitas Negeri Surabaya dan Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi atas dukungan terhadap pelaksanaan Program Mahasiswa Berdampak Tahun 2025 yang menjadi objek penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Ansell, C., & Gash, A. (2007). Collaborative Governance in Theory and Practice. 543–571. https://doi.org/10.1093/jopart/mum032

Agita, S., Purnamasari, S., Garis, R. R., & Anwar, A. N. R. (2025). Pemberdayaan masyarakat melalui program ketahanan pangan. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi, 15(1), 1–13. https://doi.org/10.33592/jiia.v15i1.5014

Artha, A. D., Nurasa, H., & Candradewini. (2023). Kolaborasi implementasi kebijakan pengelolaan sampah nagari di Kabupaten Pasaman Barat: Melihat peluang dan inovasi kebijakan. Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan, 7(1), 25–36. https://doi.org/10.21787/mp.7.1.2023.25-36

Az-zahra, N. S., & Karmila, M. (2026). Analysis of Collaborative Governance in Community Empowerment of the Kampung Ramah Lingkungan Program in Garut Regency. 11(2), 292–312.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan. (2025). Kecamatan Sambeng dalam angka 2025. Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan. https://lamongankab.bps.go.id/

Carter, N., Bryant-lukosius, D., Dicenso, A., & Blythe, J. (2014). Methods & Meanings. 41(5), 545–547. https://doi.org/10.1188/14.ONF.545-547

Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2011). An Integrative Framework for Collaborative Governance. June 2009, 1–29. https://doi.org/10.1093/jopart/mur011

Fanida, E. H., & Ladiqi, S. (2024). Collaborative governance in the village Prior Learning Recognition (PLR) program to support the achievement of village Sustainable Development Goals (SDGs). 04013.

Haris, R. A., Syafriyani, I., & Alfiyah, N. I. (2023). Collaborative governance in the development of local economic resources in Sumenep Regency. 8(2), 201–211. https://doi.org/10.26905/pjiap.v8i2.8998

Jamal, A., & Iztighfari, D. L. (2026). Collaborative public governance in implementing Indonesia's One Fuel Price Policy: Evidence from fuel distribution in frontier, outermost, and disadvantaged regions. Mimbar: Jurnal Penelitian Sosial dan Politik, 15(2), 427–445.

Vol. 6, No. 6 -November 2026, Hal. 3892-3905
DOI: 10.59395/altifani.v6i6.1454

https://doi.org/10.32663/491dt844

Kirchherr, J., Reike, D., & Hekkert, M. (2017). Resources , Conservation & Recycling Conceptualizing the circular economy : An analysis of 114 de fi nitions. 127(April), 221–232. https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2017.09.005

Lu, H., Carter, A., Lu, H., & Carter, A. (2023). Emergent regional collaborative governance in rural local food systems development food systems development. Community Development, 54(2), 228–256. https://doi.org/10.1080/15575330.2022.2135550

Manuel, J., Mendoza, F., Velasco-mu, J. F., Aznar-s, A., & Gallego-schmid, A. (2021). Resources , Conservation & Recycling Circular economy implementation in the agricultural sector : Definition , strategies and indicators. 170(April). https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2021.105618

Meirinawati, Rahaju, T., Ma'ruf, M. F., Kurniawan, B., & Pradana, G. W. (2018). Penerapan etika layanan dalam perspektif kolaborasi governance pada Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada. DIA: Jurnal Administrasi Publik, 16(2), 73–81. https://doi.org/10.30996/dia.v16i2.1901

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.). SAGE Publications.

Miranda, B. V., Monteiro, G. F. A., & Rodrigues, V. P. (2021). Technological Forecasting & Social Change Circular agri-food systems : A governance perspective for the analysis of sustainable agri-food value chains. Technological Forecasting & Social Change, 170(July 2020), 120878. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2021.120878

Nederhand, J. (2021). Evaluating the Role of Government Collaboration in the Perceived Performance of Community-Based Nonprofits : Three Propositions. 634–652. https://doi.org/10.1093/jopart/muaa059

Orbawati, E. B., & Mukti, A. (2023). Collaborative Governance Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Bligo Sebagai Strategi Mengatasi Dampak Pandemi Covid-19. 8(1).

Prabowo, A., Khairul Muluk, M. R., & Hayat, A. (2021). Model collaborative governance dalam pembangunan desa pada masa COVID-19: Studi di Kabupaten Lampung Selatan. Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 6(1), 15–31. https://doi.org/10.26905/pjiap.v6i1.5393

Salsabila, L., Ariany, R., & Koeswara, H. (2024). Fostering community-led waste management through dynamic governance: A case study of Batam City. Jurnal Bina Praja, 16(1), 187–200. https://doi.org/10.21787/jbp.16.2024.187-200

Saleh, C., Hendrik, E., Zauhar, S., & Nuh, M. (2021). Collaborative governance in public administration perspective. Journal of Southwest Jiaotong University, 56(6), 655–665.

Saputra, S. A., & Wibawani, S. (2025). Collaborative Governance in The Lontong Kupang Program of The Surabaya City Government. 14(2), 435–443.

Sihaloho, U. O., & Rusliadi, R. (2025). Collaborative Governance in Plastic Waste Recycling in Medan City : Integrating Informal Sector , Community Participation , and Policy. 11, 26–37.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Vazquez-brust, D. (2020). The governance of collaboration for sustainable development: Exploring the "black box." Journal of Cleaner Production, 120260. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.120260

Virnandasari, A., & Mawardi, F. D. (2024). SROI Program Lingkungan Peternakan Sapi Terintegrasi (Literasi) CSR Petrokimia Gresik : Pendekatan Present Value dan Future Value. 8(April), 1669–1686.

Wijaya, C., Dian, V., & Sari, P. (2019). Encouraging Collaborative Governance in Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Management in Indonesia. 9(2), 101–112.